



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-730.KP.10.02 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KP.03.04-004 tanggal 28 Mei 2021 dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-730.KP.10.02 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 September 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	FAUZHAN AKBAR FHAZMIE BASHA, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 198607082010121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	231,935
2.	MUKHLIS AHMAD, A.Md.Im., S.H. NIP. 198710192006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	225,440
3.	ANISSA MUSTIKA, A.Md.Im., S.H. NIP. 198408162002122002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	214,819
4.	ALVIANO PRASTIO MORTI DILIANTO, S.S. NIP. 198311032014021002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	210,067
5.	JUNAIDUL FITRIYONO, S.S. NIP. 198506212012121004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	207,000
6.	MUSTAKIM TENRENG, S.Pd. NIP. 198904132012121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	207,930
7.	CHAIRINA INDOMAN, S.Pd. NIP. 198911032012122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	203,368
8.	RINI PUSPITA, A.Md., S.S. NIP. 198605282010122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	203,496
9.	DESY LINDAWATI, S.S. NIP. 198212202012122004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	203,325

1	2	3	4	5	6
10.	YULIANTI SUTAMI, S.E. NIP. 198207052006042001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	203,177
11.	AROHIM YUDI, S.Kom. NIP. 198102062006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	202,657
12.	AHMAD YUDI PRATAMA, S.Kom. NIP. 198611192014021001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	202,169
13.	YUNING KURNIATI, A.Md.Im. NIP. 198906222009122001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Terampil /Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	Pemeriksa Keimigrasian Mahir /Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	153,957
14.	NOUKE PANGEMANAN, A.Md.Im. NIP. 198711232006042001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Terampil /Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	Pemeriksa Keimigrasian Mahir /Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	141,224
15.	JUNAIDI, A.Md. NIP. 198706282010121003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Terampil /Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Pemeriksa Keimigrasian Mahir /Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	109,434
16.	AYI SOPIANDI, A.Md. NIP. 198209092010121001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Terampil /Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Mahir /Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	101,224
17.	ODRYANI SIMPAN, A.Md.Kom. NIP. 198210272010122002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemeriksa Keimigrasian Terampil /Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	Pemeriksa Keimigrasian Mahir /Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	101,164



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002